BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Konsep teori keagenan (agency theory) menurut R.A Supriyono (2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Dengan adanya integrated reporting maka infomasi yang ada menjadi lebih lengkap, tidak hanya aspek keuangan tetapi juga non-keuangan seperti strategi, tata kelola, prospek jangka panjang, dan isu lingkungan, social serta keberlanjutan (ESG). Ini membantu principal (pemegang saham) memahami kinerja dan arah perusahaan secara lebih transparan dan menyeluruh. Laporan yang transparan memperkecil kemungkinan manager bertindak semaunya, dengan adanya integrated reporting agen lebih bertanggung jawan atas tindakannya karena semua pemangku kepentingan dapa melihat bagaimana keputusan mereka berdampak

dalam jangka panjang. Integrated reporting juga mendemostrasikan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan nilai jangka panjang dan tanggung jawab social. Hal ini memberikan sinyal positif kepada investor (principal) bahawa agen menjalankan perusahaan secara berintegrasi dan berkelanjutan. Maka dengan adanya integrated reporting membantu menjembatani kesenjangan informasi antara agen dan principal, serta mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan nilai perusahaan secara keberlanjutan

2.1.1 *Integrated Reporting*

1. Pengertian *Integrated Reporting*

Integrated Reporting adalah pendekatan pelaporan yang menyatukan informasi keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan tunggal. *Integrated Reporting* yang dikembangkan oleh *International Integrated Reporting Council* (IIRC), adalah sebagai bentuk pelaporan yang dapat melengkapi seluruh kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam menggambarkan akuntanbilitas perusahaan kepada para pengguna, *Integrated Reporting* dapat mempengaruhi cara perusahaan mengkomunikasikan nilai perusahaan dalam jangka pendek dan panjang dengan menunjukkan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan kondisi sosial, lingkungan dan investor yang dapat berdampak pada penciptaaan nilai perusahaan.

IIRC mendefinisikan *Integrated Reporting* yakni komunikasi ringkas terkait strategi dari perusahaan, tata kelola perusahaan, kinerja dan prospek perusahaan

dalam konteks lingkungan eksternal perusahaan, yang mana mengarah untuk penciptaan nilai perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang. (IAPI, 2018)

2. Elemen – Elemen *Integrated Reporting*

International Integrated Reporting Council (IIRC) membuat *Integrated Reporting* menjadi delapan elemen yang disajikan agar sebuah laporan disebut sebagai laporan terintegrasi sebagai berikut :

a. Organizational Overview And External Environment.

Pada elemen ini menjelaskan tentang informasi terkait aktivitas perusahaan dan dalam lingkungan seperti apa perusahaan beroperasi serta mengidentifikasi misi dan visi organisasi, dan menyediakan konteks penting dengan mengidentifikasi hal-hal seperti: Budaya, etika dan nilai-nilai perusahaan, struktur kepemilikan dan struktur operasi, pasar dan kegiatan perusahaan, Market positioning dan kompetisi perusahaan terpublikasi, letak/posisi perusahaan di rantai suplai, informasi mengenai perubahan hukum, politik, dan lingkungan sosial, kondisi ekonomi mikro dan makro (seperti stabilitas ekonomi, globalisasi, dan tren industri), isu-isu sosial, seperti populasi dan demografi perubahan, hak asasi manusia, kesehatan, kemiskinan, nilai-nilai kolektif dan sistem pendidikan, perubahan lingkungan legislatif dan peraturan.

b. Governance

Elemen ini menjelaskan tentang informasi struktur tata kelola perusahaan

termasuk keterampilan dan keberagaman (misalnya, Pendidikan, pengalaman, dan kompetensi para dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Selain itu juga, elemen ini menyajikan informasi mengenai tindakan yang telah diambil oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan strategis perusahaan termasuk budaya, nilai-nilai etika, hubungan dengan para stakeholder, dan permasalahan remunerasi.

c. Opportunities dan Risk

Elemen ini menyajikan tentang faktor kunci dari risiko dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan seperti identifikasi, sumber-sumber dan keterkaitan antara risiko dan peluang. Bagaimana faktor kunci ini akan memiliki pengaruh terhadap penciptaan nilai perusahaan dan bagaimana perusahaan menanggulangi hal tersebut. Termasuk juga terdapat ketersediaan, kualitas dan keterjangkauan sumber daya yang relevan dalam jangka pendek, menengah dan panjang

d. Strategy And Resource Allocation

Elemen ini menjelaskan informasi mengenai strategi dan resource allocation yang berisi tentang tujuan strategi perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan panjang dan strategi perusahaan dalam menghadapi tujuan tersebut. Terdapat rencana alokasi sumber daya dalam rangka implementasi strategi serta informasi tentang keunggulan kompetitif perusahaan (misalnya: peran inovasi, peran intellectual capital, pertimbangan linkungan dan sosial)

e. Bussiness Model

Business model adalah cara organisasi menciptakan, memberikan, dan mempertahankan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks Integrated Reporting, elemen ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola input (seperti modal finansial, manusia, alam) untuk menghasilkan output dan outcome melalui aktivitas utamanya.

f. Performance

Sebuah laporan yang terintegrasi berisi informasi kualitatif dan kuantitatif tentang kinerja yang dapat mencakup hal-hal seperti: indikator kuantitatif terhadap target dan risiko dan peluang, informasi kinerja keuangan, informasi mengenai bagaimana perusahaan menanggapi stakeholder, informasi yang menghubungan kinerja masa lalu dengan saat ini serta informasi mengenai dampak regulasi terhadap kinerja perusahaan.

g. Outlook

Elemen ini menyajikan informasi mengenai informasi tentang ekspektasi perusahaan atas perubahan lingkungan,bagaimana strategi perusahaan untuk menghadapi perubahan lingkungan di masa depan, analisis prospek keuangan terkait pengaruh perubahan lingkungan di masa depan, informasi peramalan keuangan terkait perubahan lingkungan di masa depan, informasi mengenai kebijakan materialitas dan kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, serta identifikasi materialitas informasi yang akan dilaporkan.

h. Basis of Presentation

Elemen ini menjelaskan tentang dasar pengungkapan yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan agar dapat dievaluasi tingkat pemenuhan kriteria pelaporan. Laporan terintegrasi mendeskripskan persiapan dan penyajian informasi, termasuk proses penentuan materialitas, batasan pelaporan dan cara menentukan batasan tersebut, serta rerangka dan metoda signifikan dalam mengkuantifikasi atau mengevaluasi hal- hal material

3. Prinsip – Prinsip *Integrated Reporting*

Menurut *International Integrated Reporting Council* prinsip – prinsip dalam Integrated Reporting adalah sebagai berikut:

a. Strategic focus and future orientation

Laporan terintegrasi harus mencerminkan strategi organisasi dalam menciptakan nilai jangka pendek, menengah, dan panjang. Laporan harus menjelaskan arah masa depan perusahaan, termasuk tujuan strategis, respon terhadap risiko dan peluang, serta prospek jangka panjang. Dengan prinsip ini, pemangku kepentingan dapat memahami arah strategis, kemajuan kinerja, serta kesiapan perusahaan menghadapi perubahan.

b. *Stakeholder relationships*

Laporan terintegrasi harus memberikan pemahaman sifat dan kualitas hubungan organisasi dengan stakeholder termasuk pemahaman organisasi dalam mempertimbangkan dan merespon kebutuhan dan kepentingan.

c. *Materiality*

Laporan terintegrasi harus mengungkapkan informasi mengenai hal substantif yang berpengaruh terhadap organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu.

d. *Conciseness*

Laporan terintegrasi yang singkat tetapi mencakup semua konteks yang cukup untuk memahami kondisi perusahaan.

e. *Reliability and completeness*

Merupakan kompetisi, kapabilitas, pengalaman dan motivasi dalam berinovasi. Informasi dalam laporan yang terintegrasi harus disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu.

f. *Consistency and comparability*

Informasi dalam laporan yang terintegrasi harus disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu

4. Tujuan Integrated Reporting :

a. Meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi penyedia modal keuangan untuk alokasi modal lebih efisien dan produkt

b. Mempromosikan pendekatan yang lebih kohesif dan juga efisien untuk pelaporan perusahaan yang mengacu pada rangkaian pelaporan berbeda dan mengkomunikasikan berbagai factor secara material memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu.

c. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan untuk modal dasar yang luas (mengenai keuangan, manufaktur, manusia, intelektual, social, hubungan dan juga alam) dan mendorong pemahaman mengenai kemandirian

d. Mendukung pemikiran terintegrasi, pengambilan keputusan dan tindakan yang berfokus pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

5. Isu – isu Penerapan Integrated Reporting di Indonesia :

a. Belum Adanya Regulasi yang Mengikat

Penerapan IR di Indonesia masih bersifat sukarela (voluntary) dan belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang mengikat. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan penyusunan sustainability report bagi emiten dan perusahaan publik sejak tahun 2022 melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, namun ketentuan tersebut belum mencakup kerangka pelaporan terintegrasi sebagaimana ditetapkan oleh IIRC.Akibatnya, belum terdapat standar atau pedoman nasional yang secara tegas mewajibkan atau mengarahkan perusahaan untuk menyusun laporan terintegrasi yang mencakup delapan elemen utama IR.

b. Minimnya Pemahaman dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Penerapan IR memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip pelaporan terintegrasi, termasuk penguasaan terhadap konsep nilai jangka panjang, model bisnis, dan hubungan antar capital. Sayangnya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas SDM, baik di level manajerial maupun operasional. Hal ini menyebabkan perusahaan

cenderung menyusun laporan berdasarkan format yang sudah ada (seperti laporan tahunan dan laporan keberlanjutan), tanpa mengintegrasikan informasi tersebut secara konseptual dan strategis sesuai kerangka IR.

c. Kesulitan dalam Integrasi Informasi Keuangan dan Non-Keuangan

Salah satu tantangan utama IR adalah menggabungkan informasi kuantitatif (keuangan) dengan informasi kualitatif (non-keuangan) yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Banyak perusahaan masih memandang informasi non-keuangan sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian strategis dalam proses penciptaan nilai.Ketidakmampuan dalam mengintegrasikan dua jenis informasi ini secara holistik menyebabkan laporan terintegrasi tidak mencerminkan hubungan antara strategi, kinerja, risiko, dan penciptaan nilai jangka panjang.

d. Tidak Adanya Standar Pengukuran untuk Modal Non-Keuangan

IR memperkenalkan enam jenis modal (capital), yaitu: keuangan, manufaktur, intelektual, manusia, sosial & relasional, dan alam. Di antara modal-modal tersebut, hanya modal keuangan yang memiliki standar pengukuran baku (misalnya PSAK). Modal non-keuangan seperti modal sosial, intelektual, dan lingkungan sulit diukur secara kuantitatif dan objektif. Ketidakterstandaran ini membuat perusahaan kesulitan dalam menentukan indikator kinerja utama (KPI) dan dalam membuktikan kontribusi modal-modal non-keuangan terhadap penciptaan nilai.

e. Kepatuhan terhadap Elemen-Elemen IR Framework Masih Rendah

Kerangka IR mencakup delapan elemen konten utama: organizational

overview, governance, business model, risks and opportunities, strategy and resource allocation, performance, outlook, dan basis of presentation. Namun, berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum mampu menyajikan seluruh elemen ini secara lengkap dan konsisten. Elemen-elemen seperti outlook, risiko dan peluang, serta model bisnis sering kali diabaikan atau hanya disampaikan secara naratif tanpa hubungan yang jelas dengan elemen lainnya.

f. Kurangnya Keterlibatan Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

IR menekankan pentingnya kepemimpinan dari manajemen puncak dalam menyampaikan informasi strategis dan mencerminkan akuntabilitas tata kelola perusahaan. Namun, pada praktiknya di Indonesia, penyusunan laporan terintegrasi sering kali menjadi tanggung jawab unit CSR atau bagian keuangan tanpa keterlibatan aktif dari dewan komisaris dan direksi. Minimnya keterlibatan pimpinan menyebabkan laporan tidak mencerminkan strategi jangka panjang perusahaan secara menyeluruh dan kehilangan relevansi terhadap pembuat keputusan.

g. Kendala Biaya dan Infrastruktur Teknologi

Penerapan IR yang berkualitas membutuhkan sistem informasi yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data keuangan dan non-keuangan secara real time dan terintegrasi. Di Indonesia, terutama pada perusahaan berskala kecil hingga menengah, keterbatasan dana dan infrastruktur menjadi kendala signifikan. Biaya tinggi untuk membangun sistem pelaporan dan kurangnya

infrastruktur teknologi menjadi hambatan dalam mempraktikkan IR yang sesuai dengan standar internasional.

h. Kurangnya Kesadaran Nilai Strategis dari IR

Banyak perusahaan di Indonesia belum melihat IR sebagai alat strategis untuk menciptakan nilai jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. IR masih dianggap sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Padahal, IR dapat menjadi sarana penting untuk menarik investor, memperkuat reputasi perusahaan, dan memperjelas strategi penciptaan nilai di tengah tekanan isu keberlanjutan global.

2.1.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ pengawas pada struktur perusahaan dengan sistem dua tingkat (two-tier board system) yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas manajemen oleh Dewan Direksi, memberikan nasihat strategis, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi, dan kepentingan pemegang saham. Komisaris bersifat non-eksekutif umumnya tidak mengelola operasi sehari-hari) dan memiliki kewenangan pengawasan, penunjukan/penilaian auditor atau komite pengawas, serta intervensi bila terjadi konflik kepentingan atau kegagalan pengelolaan oleh direksi. (Mulyana *et, al* 2024).

Kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris, yaitu :

1. Anggota dewan komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Anggota dewan komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Anggota dewan komisaris harus melaksanakan GCG
4. Anggota dewan komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.

Fungsi pengawasan dewan komisaris :

1. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal dewan komisaris mengambil keputusan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan, maka keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, sehingga tanggung jawab operasional tetap berada pada direksi.
2. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
3. Apabila terjadi kekosongan dalam direksi atau pada keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah merupakan suatu keputusan operasional.
4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak memperoleh informasi tentang

perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.

5. Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dari RUPS.

2.1.3 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Mulyana *et.,al* 2024)

Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi :

1. Jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kebutuhan span of control perusahaan.
2. Anggota direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan antara lain melalui penyaringan oleh pihak-pihak yang mempunyai hak untuk mengusulkan kepada RUPS atau melalui komite nominasi dan remunerasi apabila telah dibentuk. Pemberhentian anggota direksi dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Seluruh anggota direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.

Integritas dan kemampuan anggota direksi :

1. Anggota direksi harus memenuhi persyaratan integritas dan kemampuan termasuk bidang aktuaria, sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Anggota direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Anggota direksi harus memahami dan melaksanakan GCG.
4. Anggota direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha atau pihak lain.

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi :

1. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran pasar.
2. Direksi harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.
3. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.
4. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu namun tanggung jawab tetap berada pada direksi.
5. Direksi harus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat

digunakan sebagai salah satu penilaian kinerja.

6. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan
7. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
8. Perusahaan harus memiliki fungsi pengawasan internal dan dalam hal perusahaan telah memerlukan berupa satuan kerja.

2.1.4 Komite Audit

Komite audit dianggap sebagai badan pengawas di dalam dewan yang bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan hubungan/koordinasi dengan auditor eksternal (Singhania & Panda, 2024). Badan tersebut ditugaskan untuk mendukung tugas-tugas dari dewan komisaris dalam memastikan bahwa penyajian laporan keuangan dapat dilaporkan secara wajar mengikuti prinsip-prinsip antara akuntansi yang berlaku umum, perusahaan telah menerapkan struktur pengendalian internal dengan baik, penerapan audit eksternal dan internal dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip standar audit, dan ditindaklanjuti temuan audit dibuat oleh manajemen.

Komite audit termasuk dalam komponen mekanisme tata kelola suatu perusahaan. Komite audit ditugaskan untuk membantu dewan komisaris dalam tugas dan fungsinya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan direksi akan melaporkan atau menyampaikan hal hal yang seharusnya disampaikan kepada komite audit, komite audit memberikan pendapat independen atas laporan

yang telah disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan membantu tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan dewan komisaris (Parinduri *et al.*, 2021).

Komite audit mampu menjadi penghubung apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan dewan komisaris dan sebagian komite audit berasal dari dewan komisaris sehingga komite audit memiliki peran penting dalam pengawasan dan memonitor audit laporan keuangan. Komite audit membantu komisaris dalam menghindari terjadinya kecurangan data keuangan yang dilakukan oleh manajemen, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan memberikan nasihat apabila terjadi masalah terkait kebijakan keuangan.

Tugas komite audit dalam perusahaan untuk melindungi dari tindakan kecurangan kepada pemegang saham. Dewan komisaris membentuk komite audit untuk melakukan pengawasan terhadap independensi manajemen pada dewan direksi, memastikan tugas auditor internal dan eksternal terhadap pelanggaran, memastikan terhadap sistem pengendalian internal sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai standar akuntansi keuangan yang diberlakukan secara umum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Saminem, Suzana	The Role Of Stock Price in	Variabel: Integrated Reporting	Hasil dari penelitian ini adalah IR

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Sulaiman, Maslinawati Mohamad, (2024)	The Linkage within Integrated Reporting and Firm value : A Comparative Study in Indoesia	(X), Stock Price (M), Firm Value (Y)	berpengaruh negatif signifikan terhadap Firm Value, dan stock price melemahkan pengaruh IR terhadap firm Value
2	Lavinia Songini, Adalberto Pistoni, Giovanni Comerio, dan Patrizia Tettamanzi (2023).	The Influences of Good Corporate Governance and Company Age on Integrated Reporting Implementation	Variabel : adopsi IR, kualitas IR, assurance, peran dewan, framework IR.	adopsi IR dipengaruhi faktor tata kelola; kualitas IR meningkat dengan governance yang kuat, namun riset lintas konteks masih terbatas
3	Utami, K., Amyulianthy, R., & Astuti, T (2022)	Good Corporate Governance and Integrated Reporting Implementation of Rev. 4.0	Variabel Independen : Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, Institutional Ownership, Managerial Ownership Variabel Dependen : Integrated Reporting	Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee berpengaruh signifikan terhadap Integrated Reporting Sedangkan, Institutional Ownership, Managerial Ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap Integrated Reporting
4	Al-Khatib *et al.* (2023)	Audit committee effectiveness and integrated reporting quality: Does family ownership matter?	Variabel : Atribut Komite Audit (independensi, frekuensi rapat, expertise); Family ownership (moderator)	Efektivitas komite audit berkorelasi positif dengan kualitas IR; kepemilikan keluarga memoderasi hubungan tersebut.
5	El-Deeb & Mohamed	Moderating role of board	Variabel Independen :	Independensi komite audit positif terhadap

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	(2024)	gender diversity on audit committee attributes & IR quality	Audit Committee attributes; Board gender diversity (moderator Variabel Dependen : Integrated Reporting	IRQ; pengaruh diperkuat pada dewan dengan keberagaman gender lebih tinggi.
6	Mshana, Mzenzi & Suluo (2024)	Enhancing integrated reporting quality through boardroom diversity: board diligence	Independen : Board diversity (gender/kompetensi), board diligence (meeting freq.) Dependen : Integrated Reporting	Board diversity + diligence berasosiasi positif dengan kualitas IR khususnya di industri petroleum
7	Wiley / CSR paper (2025)	Audit quality and materiality disclosure in integrated reporting (carbon assurance	Independen : Audit quality (Big Four, fees), assurance quality (carbon assurance) Dependen : Integrated Reporting	Audit berkualitas tinggi dan assurance eksternal berkorelasi positif dengan kualitas pengungkapan materialitas dalam IR.
8	Saida Belhouchet, Jamel Chouaibi (2024)	The impact of audit committee attributes on integrated reporting quality: evidence from European companies listed on the STOXX Europe 600 index	Independen : Independensi audit committe, frekuensi rapat, Keahlian keuangan anggota komite Dependen : Integrated Reporting	Independensi audit committe, frekuensi rapat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas IR, namun keahlian keuangan anggota komite tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas Integrated Reporting
9	Taylor & Francis study (2024)	Board meeting frequency (diligence) and IR / sustainability disclosure	Independen : Board meeting frequency, board expertise, ESG focus Dependen : Integrated Reporting	Frekuensi rapat dewan (diligence) berasosiasi positif dengan pengungkapan ESG dan kualitas IR, terutama bila board memiliki keahlian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				relevan.
10	Sheela Sundarasen, Rajespari Kumar, Krishna Tanaraj, Ahnaf Ali Alsmady, Usha Rajagopalan (2024)	From board diversity to disclosure: A comprehensive review on board dynamics and ESG reporting	Independen : board diversity (gender, usia, pendidikan, keahlian), independensi dewan, ukuran dewan, keberadaan komite audit/sustainability, frekuensi rapat. Dependen : Integrated Reporting	Board diversity dan mekanisme tata kelola yang kuat umumnya meningkatkan kualitas pengungkapan ESG dan IR, meskipun efeknya bervariasi menurut konteks dan regulasi.
11	Muskan Sahu, Anisha Mishra, Waleed M. Alahdal, Mina Sami. (2025)	ESG performance and audit committee expertise: advancing sustainable development goals in leading nations	Variabel : ESG performance (independen), audit committee expertise (moderator), pencapaian SDGs (dependen)	ESG berpengaruh positif signifikan pada SDGs; keahlian komite audit memperkuat hubungan tersebut.
12	Sumaia A. Qaderi, Belal A. A. Ghaleb, Abdulwahid A. Hashed, Sitraselvi Chandren, Zaimah Abdullah (2023)	Board Characteristics and Integrated Reporting Strategy: Does Sustainability Committee Matter?	Karakteristik dewan (ukuran, independensi, gender, remunerasi, multiple directorship), keberadaan sustainability committee, kualitas & kuantitas IR	Ukuran, independensi, gender, remunerasi berpengaruh positif signifikan pada IR; multiple directorship tidak signifikan; sustainability committee memperkuat hubungan tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta masalah yang ada

sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut kerangka pemikiran yang digunakan peneliti ini :

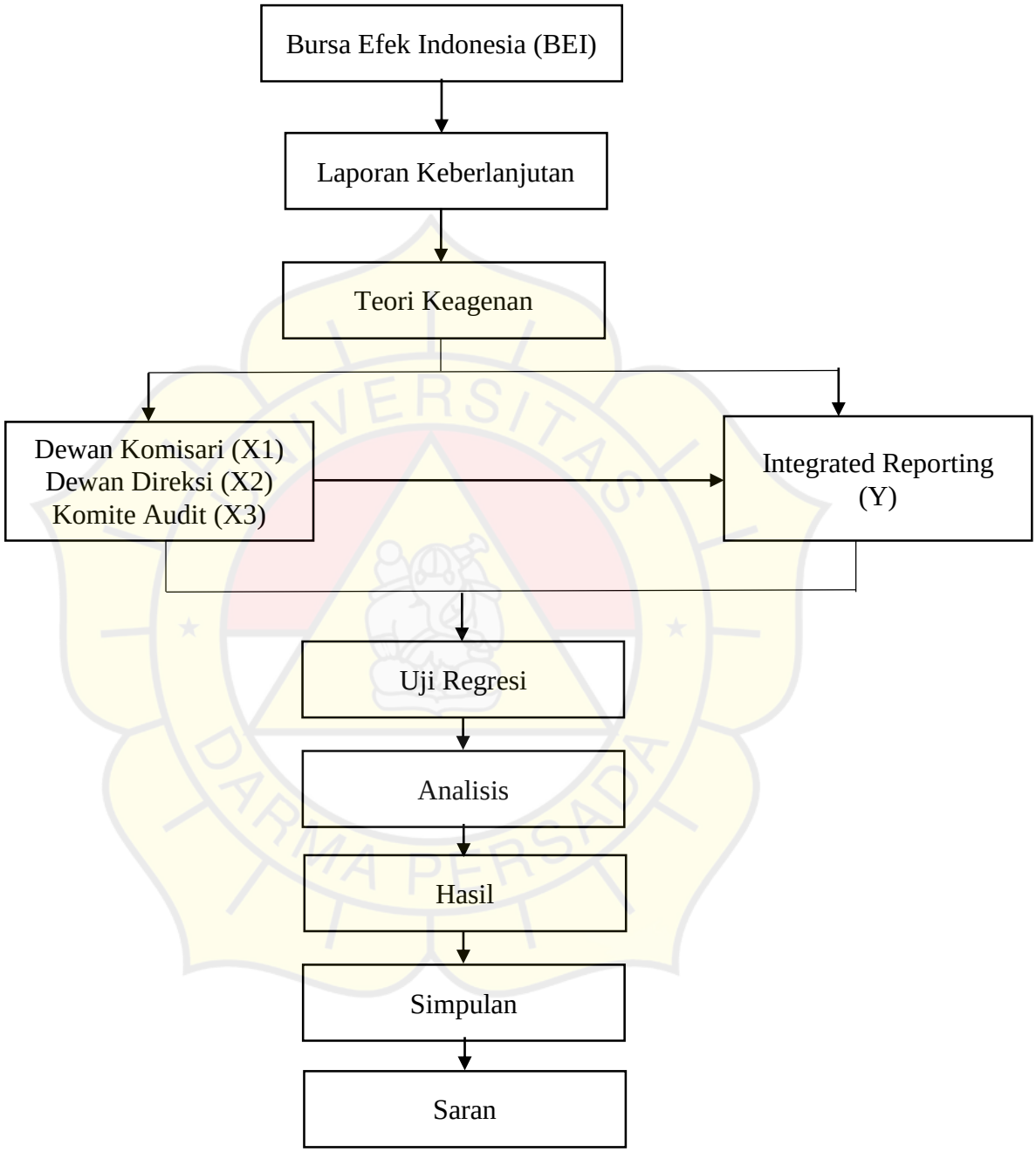

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Data dalam penelitian ini menggunakan data perusahaan perbankan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia. Data mengenai dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit diambil dari laporan tahunan perusahaan periode 2021 – 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Data yang didapat kemudian dilakukan uji regresi sehingga dapat suatu hasil yang kemudian akan dianalisis kembali dan menghasilkan kesimpulan

2.4 Model Konseptual

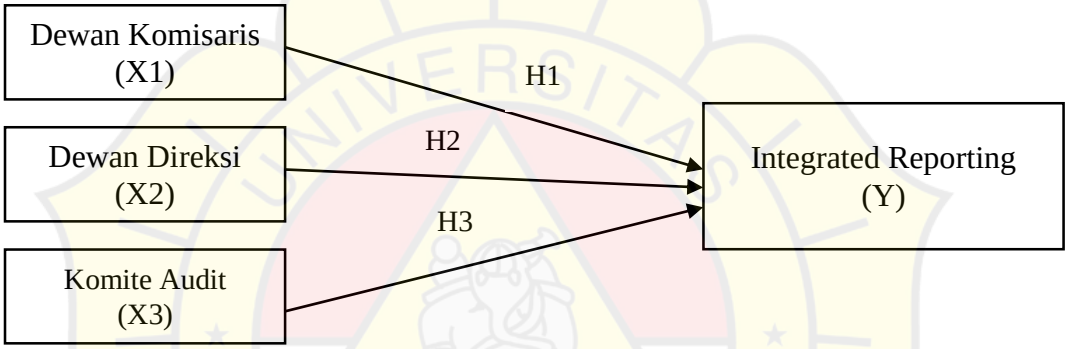

Gambar 2.2 Model Konseptual

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Dewan Komisaris Dan *Integrated Reporting*

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan rapat umum pemegang saham, serta peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Penelitian Makri, Makan, & Kabra (2023) menunjukan bahwa di India dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kualitas integrated reporting. Penelitian Sobhan & Mia (2024), Penelitian Wong, Amran, & Chu (2023), penelitian Mohd Ariff & Ooi (2024) juga menunjukan hasil yang signifikan. Sedangkan penelitian Fayad *et al.* (2024), penelitian Sobhan & Mia (2024), penelitian Wong, Amran, & Chu (2023) dan penelitian Belhouchet & Chouaibi (2024) menunjukan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas integrated reporting. Dari penjelasan ini hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kualitas Integrated Reporting perusahaan perbankan periode 2021- 2023

2.5.2 Dewan Direksi Dan *Integrated Reporting*

Adanya dewan direksi dapat membuat pengungkapan informasi entitas perusahaan melalui Integrated Reporting menjadi semakin meningkat. Besarnya ukuran dewan direksi dalam suatu entitas perusahaan mampu memengaruhi keputusan manajemen, meningkatkan kekuatan manajerial, dan dapat meningkatkan fokus terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Artinya, perusahaan dengan lebih banyak direktur akan lebih mampu meningkatkan keterbukaan pelaporan terintegrasi. Selain itu, dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar lebih cenderung mempertimbangkan opini publik ketika membuat keputusan bisnis daripada dewan dengan jumlah anggota yang lebih rendah.

Penelitian Nassar *et al.*, (2023) menunjukan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kualitas integrated reporting, sejalan dengan penelitian Butar *et*

al., (2025), Sobhan & Mia (2024), Abdelmoneim & El-Deeb (2024) yang menunjukan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kualitas integrated reporting, sedangkan penelitian Devarapalli & Mohapatra (2024), Erin (2025), Sun & Gu (2023) menunjukan hasil yang tidak signifikan. Dengan demikian didapatkan hipotesis :

H2 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap kualitas Integrated Reporting perusahaan perbankan periode 2021- 2023

2.5.3 Komite Audit Dan *Integrated Reporting*

Komite audit bertugas memberikan nasihat kepada komisaris mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan, memeriksa kebenaran laporan manajemen, dan mendukung pekerjaan manajemen supaya dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Penelitian Belhouchet & Chouaibi (2024), Sahu *et al*., (2025), Al Sanasleh *et al*., (2025), menunjukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas integrated reporting. Sedangkan penelitian Qaderi *et al*., (2024), Al-Khatib *et al*., (2023), Zaid & Ng (2023) menunjukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas integrated reporting. Dengan demikian, hipotesis yang diperoleh adalah :

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap kualitas Integrated Reporting perusahaan perbankan periode 2021- 2023